

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

SMP Negeri 1 Banjarnegara ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sejak tahun pelajaran 2008/2009 (4 tahun) berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Nomor 230/C3/KEP/2008 tanggal 8 Februari 2008. Sebagai konsekuensi rintisan sekolah bertaraf internasional, maka dengan sendirinya SMP Negeri 1 Banjarnegara menata diri dalam pemenuhan delapan standar sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 untuk memenuhi tuntutan pendidikan di era globalisasi. Standar nasional tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana dan standar pembiayaan.

Standar pembiayaan sesuai Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: 1) anggaran sekolah dirumuskan merujuk peraturan pemerintah pusat dan daerah; 2) pengelolaan keuangan sekolah transparan, efisien, dan akuntabel; 3) Sekolah membuat pelaporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun demikian, pengelolaan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Banjarnegara belum sesuai harapan, hal ini ditunjukkan dengan 1) penyusunan anggaran disusun oleh kepala sekolah dan beberapa guru, belum melibatkan seluruh guru, komite, siswa dan unsur lain

yang terkait; 2) pengelolaan keuangan tidak transparan, tidak semua guru mengetahui anggaran yang disusun; 3) akuntabilitas keuangan masih rendah, hal ini ditunjukkan hasil monitoring inspektorat, sekolah belum disiplin menyusun laporan perbulan; 4) penggunaan keuangan tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, masih banyak pengeluaran keuangan tidak sesuai mata anggaran.

Kondisi rendahnya pengelolaan keuangan di SMP Negeri 1 Banjarnegara ini berakibat: 1) penggunaan keuangan tidak efisien, terarah dan sesuai rencana anggaran; 2) kegiatan-kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana dikarenakan anggaran berubah; 3) pengeluaran tidak terkendali, kurang efisien yang berakibat beberapa kegiatan mengalami *over load* disisi lain anggaran kegiatan menjadi minim; 4) manajemen keuangan tidak jelas dan berkesan asal-asalan; 5) kurangnya kepercayaan sekolah dalam bidang keuangan.

Pengelolaan keuangan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan yang baik. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan butuh uang. Keuangan juga perlu diatur sebaik-baiknya. Untuk itu perlu manajemen keuangan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-

sumber pendanaan, pemanfaatan dana pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Di dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan (Anonim: 2000). Dengan demikian manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah, yang keseluruhan tersebut merupakan pengelolaan keuangan berbasis mutu.

Pengertian mutu menurut Umaedi (1999) mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa baik yang *tangible* maupun *intangibile*. Dalam konteks pengelolaan keuangan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Menurut Crosby mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau distandarkan (*Conformance to requirement*), yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya maupun outputnya. Oleh karena itu, mutu pendidikan yang diselenggarakan sekolah dituntut untuk memiliki baku standar mutu pendidikan. Mutu dalam konsep Deming adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Dalam konsep Deming, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan

keluaran, baik pelayanan dan lulusan yang sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan (pasar)nya. Sedangkan Fiegenbaum mengartikan mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Dalam pengertian ini, maka yang dikatakan sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat memuaskan pelanggannya, baik pelanggan internal maupun eksternal.

Seiring dengan kebijakan pemerintah bidang pendidikan, bahwa mulai tahun pelajaran 2009 sekolah menyelenggarakan pendidikan gratis bagi siswa miskin. Sebagai konsekuensinya pemerintah telah menggulirkan biaya pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besarnya biaya BOS bagi sekolah Rp 570.000,-/siswa per tahun. Dengan biaya ini maka sekolah tidak diperkenankan menarik biaya operasional kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI/SBI) dan sekolah swasta. Pembiayaan per siswa per tahun (unit cost) disesuaikan dengan kebutuhan SBI. Berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka proporsi pembiayaan SBI negeri dapat diformulasikan sebagai berikut: (1)Pemerintah pusat membiayai 50% (dari direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 300 juta), (2) dari pemerintah daerah 50 % 300 juta) 3 (3) pemerintah daerah Propinsi 30% 200 juta), (4) pemerintah daerah kabupaten/kota 20% 10 juta, (5) dari Dirjen Pembinaan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan 100 juta, (6) dari komite (7) dari sponsor/sumber lain. Formulasi tersebut dapat didiskusikan lebih lanjut, artinya, bagi daerah-daerah yang kaya, mereka dapat berkontribusi lebih dari besarnya persentase tersebut

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Pembiayaan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya pribadi. Sekolah diharapkan mampu menggali potensi daerah, masyarakat, dan lingkungan untuk pemenuhan standar penyelenggaraan atau bahkan biaya satuan pendidikan tersebut. Namun demikian, penetapan standar pembiayaan pendidikan ini tetap harus memperhatikan aspek: gender, latar belakang ekonomi peserta didik/orang tua, geografi, dan sebagainya. Pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat memberikan stimulan kepada stakeholder lain dalam kerangka memenuhi standar pendidikan pada setiap sekolah/daerah. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sangat diharapkan untuk menetapkan standar biaya pendidikan, sehingga dapat diketahui sejauh mana kekurangan yang diperlukan dari BOS pusat yang ada untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam upaya memenuhi tuntutan mutu pendidikan yang ditetapkan. Apabila ternyata dari pemerintah dan pemerintah daerah belum cukup, maka masyarakat dapat memberikan bantuan kepada sekolah, melalui pungutan sekolah dan atau sumbangan menurut kemampuan masyarakat. Semua penggunaan keuangan tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip transparan, efisien dan akuntabel.

Kondisi yang terjadi di SMP Negeri 1 Banjarnegara sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional biaya pendidikan bersumber pada BOS sebesar RP 570.000,-/siswa per bulan, iuran orang tua siswa untuk biaya operasional

Rp 100.000,-/siswa perbulan dan biaya investasi sebesar Rp. 2.500.000,-/siswa bagi kelas VII. Sesuai pedoman penggunaan dana BOS sudah sewajarnya sekolah melakukan pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggung jawabkan.

Pengelolaan keuangan di SMP Negeri 1 Banjarnegara belum memenuhi standar mutu yang sesuai harapan. banyak kejadian yang memungkinkan banyak pengalihan pendanaan dan finansial keuangan sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh baik dari siswa, guru, komite sekolah maupun masyarakat secara tidak langsung mengatakan bahwa sumber dana yang begitu besar baik yang berasal dari pemerintah pusat, daerah maupun sumbangan dari orang tua siswa yang ada di sekolah sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik hingga terjadi pembengkakan anggaran yang tidak sesuai dengan yang tertuang di RAPBS. Sementara alokasi dana yang lain tidak tercukupi seperti dana untuk peningkatan mutu SDM, akademik dan tak kalah pentingnya dana untuk peningkatan kesejahteraan baik untuk pendidik maupun tenaga kependidikan. Dengan kata lain terjadi ketidakseimbangan antara peningkatan di bidang fisik yang begitu pesat sementara peningkatan di bidang lain seperti kualitas pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masih belum memenuhi standar, dengan frekuensi kerja yang semakin tinggi karena SMP Negeri 1 Banjaranegara yang notabenenya sekolah RSBI. Hal ini disebabkan karena SMP Negeri 1 Banjarnegara merupakan SMP tertua di kabupaten Banjarnegara dengan demikian masih banyak gedung-gedung bangunan tua yang memang sudah saatnya dipugar. Selain itu juga karena terletak di pusat kota yang mana luas tanahnya terbatas hanya memenuhi standar untuk sekolah

RSBI, sehingga sesuai dengan tuntutan pengembangan sekolah SBI maka harus didukung dengan sarana/prasarana yang relevan dengan tuntutan kurikulum internasional. Dengan demikian pengembangan sarana gedung harus terpenuhi, apalagi dengan menerapkan sistem siswa pindah kelas (*moving class*). Oleh karena itu alokasi dana sebagian besar terserap ke pembangaunan fisik, sementara masih banyak diperlukan dana untuk pengembangan di bidang lain yang masih belum terpenuhi. Hal ini akan menyebabkan ketimpangan-ketimpangan yang akan berdampak pada kelancaran dan kesuksesan menuju sekolah SBI. Jika hal ini dibiarkan terus maka akan terjadi kesenjangan pada alokasi pendanaan yang tidak sesuai dengan yang tertuang dalam APBS, sehingga akan mengganggu kelancaran penyelenggara pendidikan.

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan di SMP Negeri 1 Banjarnegara maka perlu dilakukan penelitian tentang karakteristik pengelolaan keuangan berbasis mutu, karakteristik pengelola keuangan berbasis mutu dan pengambilan keputusan alokasi keuangan berbasis mutu di SMP Negeri 1 Banjarnegara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pertanggungjawaban keuangan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana pengelolaan keuangan berbasis mutu di SMP Negeri 1 Banjarnegarara. Sedangkan dari fokus penelitian tersebut dapat dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik pengelolaan keuangan berbasis mutu di SMP Negeri 1 Banjarnegara?
2. Bagaimana karakteristik pengambilan keputusan alokasi keuangan di SMP Negeri 1 Banjarnegara?
3. Bagaimana karakteristik pertanggungjawaban keuangan di SMP Negeri 1 Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini secara umum untuk mendiskripsikan manajemen pengelolaan keuangan berbasis mutu. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan karakteristik pengelolaan keuangan berbasis mutu di SMP Negeri 1 Banjarnegara?
2. Mendeskripsikan karakteristik pengambilan keputusan alokasi keuangan berbasis mutu di SMP Negeri 1 Banjarnegara?
3. Mendeskripsikan karakteristik pertanggungjawaban keuangan sekolah di SMP Negeri 1 Banjarnegara?

D. Manfaat Penelitian

Menurut Prasetya Irawan, penelitian yang baik harus melahirkan suatu manfaat. Tidak menjadi soal apakah manfaat yang dihasilkan itu manfaat praktis dan berjangka pendek ataupun manfaat secara teoritis dan hanya bisa dilihat wujudnya jauh di masa depan (Prasetya Irawan , 1997:8). Demikian

pada penelitian ini setelah mendeskripsikan manajemen pengelolaan keuangan berbasis mutu diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan keuangan berbasis mutu;
- b. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan berbasis mutu.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada para pengelola pendidikan pada umumnya dan kepala sekolah pada khususnya, yaitu sebagai bahan acuan pengelolaan keuangan berbasis mutu;
- b. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan oleh pengelola pendidikan tentang pengelolaan keuangan berbasis mutu.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses pendayagunaan sumber daya yang dimiliki sekolah secara sistematis yang dimiliki dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara efektif dan efisien.

2. Keuangan Sekolah

Keuangan sekolah adalah keseluruhan biaya pendidikan yang digunakan peserta didik untuk membiayai proses belajar mengajar di sekolah baik berbentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat diharapkan dengan uang) dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.

3. Pengelolaan Keuangan Berbasis Mutu

Pengertian mutu menurut Umaedi (1999) mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa baik yang tangible maupun intangible. Dalam konteks pengelolaan keuangan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.